

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang penting, sektor ini menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia, dan penyumbang devisa yang besar. Laporan *Tourism Trends and Policies 2022* (Media Keuangan, 2023) menyebutkan bahwa sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 16,11 juta orang, jumlah ini meningkat 1,88% dari tahun 2018 (BPS, 2020). Penerimaan devisa pada tahun 2019 meningkat dari Rp 224 triliun menjadi Rp 280 triliun (Kemenparekraf, 2020).

Peranan sektor pariwisata tidak hanya secara nasional, melalui *multiplier-effect* nya ia juga dapat berkontribusi pada perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, penyerapan investasi, perluasan lapangan kerja, serta pengembangan berbagai usaha penunjang pariwisata atau yang terkait dengan *hospitality industry*. Lebih jauh peran pariwisata diharapkan dapat dikembangkan untuk menanggulangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja di wilayah pedesaan, menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan

Dalam rangka mendukung pengembangan wisata berbasis kemasyarakatan, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata meluncurkan PNPM (Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Program ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan membuka kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Pendekatan PNPM berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Dalam penelitian lain oleh (Pantiyasa, 2018) yang berjudul Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dalam pemberdayaan masyarakat, dikatakan bahwa banyak desa-desa penerima PNPM mandiri pariwisata yang belum siap mengelola desa wisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan desa wisata, rendahnya

penguasaan bahasa asing, kurangnya penyediaan sarana akomodasi, dan tidak adanya konsultan.

Pemerintah saat ini terus berusaha melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal sebagai Desa Wisata. Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebanyak 818 desa wisata yang tersebar di 35 Kabupaten/kota. Beberapa tahun lalu hanya ada 500 desa wisata kemudian mengalami kenaikan menjadi 717 desa wisata dan saat ini sudah terdapat 818 desa wisata. (jatengprov.go.id, 2022). Penyebaran desa wisata di Indonesia tergolong belum merata. Desa wisata maju lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, desa wisata berkembang ditemukan di Bali, dan desa wisata rintisan banyak ditemukan di Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Dalam penelitian Pantiyasa (2018) yang berjudul pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dalam pemberdayaan masyarakat, ditemukan bahwa banyak desa-desa penerima PNPM mandiri pariwisata yang belum siap mengelola desa wisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan desa wisata, rendahnya penguasaan bahasa asing, kurangnya penyediaan sarana akomodasi, dan tidak adanya konsultan.

Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kemasyarakatan. Pada dasarnya pengembangan desa wisata memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat berguna untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dalam pengembangan desa wisata masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Raharjana 2012 (dalam Morotai et al., 2019), masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan pariwisata melalui pengendalian arah pengembangan untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pariwisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan solidaritas terhadap tiap program pembangunan serta mampu mengendalikan kebijakan yang ada. Menurut pendapat Damanik 2009 (dalam Morotai et.al., 2019), pengembangan pariwisata di

Indonesia banyak mendapat fasilitas dari negara, sedangkan masyarakatnya bersifat pasif karena inovasi yang disponsori negara menghadapi permasalahan krusial.

Pitana 2002:56 (dalam Palimbunga, 2017) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya berupa kontribusi tenaga, materi, dan waktu melainkan sebagai bentuk keterlibatan secara aktif dalam tiap proses pembangunan. Peran aktif dapat berupa perencanaan, penentuan rancangan, implementasi, pengawasan, dan menikmati hasil atau “*genuine participation*” atau masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Bisa dikatakan bahwa partisipasi merupakan suatu hal yang penting dan mengandung potensi besar dalam membina kerja sama tim. Apabila dalam proses pelaksanaan, partisipasi dilakukan dengan baik maka hasil yang diperoleh juga akan baik, salah satunya dengan adanya perubahan dan keterikatan terhadap tujuan yang sama mendorong pencapaian yang lebih baik.

Salah satu kisah sukses dalam pengembangan desa wisata adalah Desa Nglanggeran yang berlokasi di Patuk, Gunung Kidul. (Wirdayanti et al., 2021) Desa Nglanggeran berawal dari bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Mulai dari situ, salah satu warga Nglanggeran bernama Mursidi tergerak untuk mengembangkan wisata Gunung Nglanggeran yang pernah aktif 30-60 juta tahun lalu. Dalam pengembangannya, ternyata tidak semua warga menyetujui terkait gagasan pengembangan desa wisata. Mursidi dan pemuda karang taruna tetap bersikukuh untuk mengajak masyarakat. Melalui diskusi secara terbuka, perlahan-lahan masyarakat meyakini bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan manfaat.

Dalam penelitian (Perangin-angin & Hardianto, 2023) yang berjudul pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Pendekatan AHP, ditemukan enam faktor keberhasilan desa wisata yaitu pemberdayaan masyarakat, dukungan komunitas atau organisasi, dukungan masyarakat, potensi daya tarik wisata, kualitas manajemen desa, dan aksesibilitas. Komponen keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran merupakan elemen penting dalam pengembangan desa wisata, sebab proses pengembangan desa wisata didasarkan

pada potensi sumber daya di desa. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dapat membantu perekonomian masyarakat dengan adanya kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu pengembangan desa wisata tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat sekitar. Pengembangan ini masih diperhatikan, pasalnya tidak mudah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Salah satu permasalahan yang menghambat dalam pengembangan desa wisata adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Keterbatasan tentang pengetahuan pariwisata dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Sehingga diperlukan upaya pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan bagaimana pengembangan serta pelaksanaan desa wisata itu sendiri. Dari pihak pemerintah daerah atau instansi, juga masih kurang memberikan dukungan dan partisipasi. Sehingga menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat dalam partisipasi pengembangan desa wisata. Selain itu, tidak adanya insentif yang memadai untuk masyarakat, padahal dalam pengembangan desa wisata masyarakat perlu menerima imbalan yang layak atas kontribusinya.

Salah satu desa wisata yang menarik untuk diteliti adalah Desa Wisata Tingkir Lor Salatiga. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor Salatiga masih mengalami kesulitan dalam berbagai aspek yang meliputi partisipasi masyarakat. Dalam penelitian Chasanah (2015) yang berjudul analisis pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga, proses pengembangan potensi dilakukan dengan memanfaatkan area persawahan untuk kegiatan *outbond* dan peningkatan kualitas konveksi, dengan mengupayakan partisipasi melalui pelatihan pengelolaan desa wisata tetapi masih belum berjalan dengan baik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan desa serta kurangnya sumber daya manusia yang mengerti mengenai pengelolaan desa wisata. Dalam pengelolaan, distribusi wewenang belum berjalan dengan baik dikarenakan SK kepengurusan organisasi belum jelas yang menyebabkan koordinasi belum berjalan dengan baik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor Salatiga.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam tiap tahapan pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga.

## **D. Kajian Pustaka**

**Pertama**, penelitian Nur Chasanah, Drs.Herbasuki Nurcahyanto (2019) dengan judul *Analisis Pengelolaan Desa wisata Tingkir Lor Kota Salatiga*. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Terdapat enam konsep dasar yang digunakan yaitu administrasi publik, paradigma administrasi publik, manajemen publik, pariwisata, desa wisata, dan partisipasi. Untuk faktor penghambat berisikan permasalahan yang masih perlu diperhatikan masyarakat dan pemerintah seperti, partisipasi masyarakat, kurangnya kerjasama, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya komitmen dari pemerintahan Kota Salatiga. Pada tahap perencanaan, tidak ada partisipasi masyarakat karena penentuan desa wisata dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dalam pengorganisasian yang dilakukan pokdarwis masih terbilang kurang memenuhi harapan, sebab anggota kepengurusan memiliki pekerjaan tetap dan lebih memprioritaskan pekerjaannya. Persamaan dalam penelitian yaitu, pendekatan kualitatif dengan penggunaan Teknik salah satunya wawancara. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, menganalisis partisipasi dalam pengelolaan desa wisata yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh masyarakat setempat.

**Kedua**, penelitian Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan Baiquni (2013) dengan judul *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi*

*Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali.* Dalam penelitian ini, peran pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud. Masyarakat lokal selama ini belum terlibat dalam pengembangan desa wisata, sehingga masyarakat masih menjadi objek pembangunan dan terpinggirkan. Dalam penelitian ini dijelaskan partisipasi masyarakat di setiap tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan, parameter partisipasi berupa keterlibatan identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan untuk pengembangan desa wisata. Dari hasil lapangan, partisipasi masih tergolong semu, bentuk partisipasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian dalam tahap implementasi, parameternya adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha pariwisata seperti pengelola penginapan, hotel, dan lain-lain. Masyarakat mengalami kompetisi dengan usaha berskala besar, keterbatasan modal membuat masyarakat tidak mampu bersaing dengan mereka. Dan pada tahap pengawasan, parameternya adalah keterlibatan dalam tim pengawasan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa keterlibatan masyarakat masih minim dalam pengawasan pengembangan desa wisata. Sebab perencanaan pengembangan telah dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat tidak berkompetensi dalam tahap pengawasan. Masyarakat hanya berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif. Persamaan dalam penelitian yaitu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Perbedaannya adalah lokasi penelitian ini dilakukan di Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali.

**Ketiga**, penelitian Dinar Wahyuni (2019) dengan judul *Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat.* Penelitian ini menggunakan dua konsep utama yaitu pengembangan desa wisata dan partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat yang digunakan berasal dari Cohen dan Uphoff (1977:8) yang membagi partisipasi menjadi empat tahapan yaitu pengambilan keputusan, tahap implementasi, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi. Pada tahap awal, masyarakat terlibat langsung dari awal perencanaan, sosialisasi ke

masyarakat dan pemerintah, dan pengambilan keputusan untuk pembentukan desa wisata. Setelah itu, pada tahap implementasi masyarakat melakukan secara sukarela untuk meningkatkan kualitas pelayanan homestay. Kemudian tahap menikmati hasil, keadaan masyarakat semakin lebih maju akibat adanya pemasukan dan lapangan pekerjaan baru. Pada tahap akhir terdapat evaluasi, masyarakat rutin melakukan pertemuan yang diadakan sebulan sekali dan pertemuan dengan forum pengelola desa wisata Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian, partisipasi masyarakat cukup besar dalam pengembangan desa wisata akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang masih belum berpartisipasi. Sehingga masih perlu ajakan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan desa, supaya manfaat dari kegiatan desa wisata dapat dirasakan secara merata. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Perbedaannya yaitu, konsep Partisipasi dari Cohen dan Uphoff dan konsep pengembangan desa wisata dari Wearing & Donald.

**Keempat**, penelitian Novie Istoria Hidayat (2017) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil pemberdayaan dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo antara lain bantuan modal, pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, pelatihan pemandu wisata, manajemen wisata, pembukuan tentang wisata, struktur organisasi, pengelolaan obyek wisata gua, bahasa asing, kuliner, dan manajemen pengelolaan wisata pedesaan. Dalam penelitian ini, pengembangan Desa Wisata Jatimulyo dapat dilihat pada beberapa kegiatan, pertama pembangunan SDM seperti diskusi, seminar, diskusi, dan lain-lain. Kedua, kemitraan dengan pihak geologi karst, organisasi dalam bidang *rescue*, PLN, jogja *bird watching*, dan pihak-pihak lainnya. Ketiga, melakukan promosi melalui TV, media sosial, pemeran, dan lain-lain. Keempat, membina organisasi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

**Kelima**, penelitian Siska Yuliana, Alfitri, dan Yusnaini (2019) dengan judul *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Danau Teluk Gelam, Ogan Komering Ilir*. Konsep yang digunakan adalah konsep partisipasi

masyarakat menurut Margono Slamet. Dalam pengembangan obyek wisata, terdapat empat bentuk partisipasi yaitu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, *monitoring & evaluasi* pembangunan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu kesempatan, kemampuan, dan kemauan untuk berpartisipasi. Dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat berupa keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan, memanfaatkan hasil serta menikmati hasil pembangunan yang nyata. Bentuk partisipasinya berupa kehadiran rapat dan usulan mengenai pembuatan papan *selfie* dan lahan parkir serta dibentuk pasar modern untuk wisatawan membeli cinderamata. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi yang ditemukan di lapangan antara lain: mengawasi dan menjaga keamanan dalam pengembangan pariwisata, menjaga lingkungan objek wisata, pengembangan agrowisata dengan menanam sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat seperti berikut evaluasi mengenai restoran objek wisata yang terlalu mahal, kolam pemancingan yang bagus dan bagus, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, bentuk partisipasi yang ada adalah menjadi karyawan di objek wisata, berjualan di objek wisata, dan lain-lain.

**Keenam**, penelitian Andi Mulyan dan Lalu Moh Yudha Isnaini (2022) dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah*. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa terdapat peningkatan ekonomi masyarakat desa, mulai dari peningkatan pendapatan hingga berkurangnya pengangguran serta penurunan kriminalitas. Partisipasi masyarakat Desa Masmas tergolong bagus, dan memiliki dampak positif peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini diuraikan partisipasi masyarakat yang ada dalam setiap tahapan yaitu pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan, pemberdayaan sumber daya manusia, evaluasi dan pemanfaatan hasil.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan pariwisata terutama dalam pengendalian arah pengembangan pariwisata, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari aktivitas wisata Rahaajana 2012, (dalam Morotai et al., 2019). Sedangkan Nursing (2013), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi permasalahan ketimpangan karena kesenjangan antar masyarakat lokal dan pemangku kepentingan.

Partisipasi menurut Keith Davis (dalam Mulyan & Isnaini, 2022), merupakan keterlibatan emosi dan mental dalam situasi kelompok yang mendorong usaha pencapaian tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut pandangan Abe 2002 (dalam Dewi, 2013), partisipasi masyarakat bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak setiap warga negara. Dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), dikatakan bahwa tiap warga memiliki hak untuk berperan dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi menurut Arnstein (1969) (dalam Dewi, 2013), memiliki makna sebagai kekuatan dalam masyarakat yang berguna untuk mengatasi persoalan pada masa kini dan mencapai kehidupan lebih baik pada masa yang akan datang.

Dari penjelasan di atas, dalam tipologi partisipasi Tosun dalam (Jannah & Suryasih, 2019) membagi bentuk partisipasi menjadi tiga tipe yaitu seperti berikut:

1. Partisipasi Paksaan (*Coercive Participation*): Partisipasi yang dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan
2. Partisipasi Terdorong (*Induced Participation*): Partisipasi yang dilakukan karena masyarakat terdorong untuk melakukannya.
3. Partisipasi Spontan (*Spontaneous Participation*): Partisipasi yang dilakukan secara spontan

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1998), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, bentuk partisipasi ini terletak pada level satu yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dan yang diinginkan. Partisipasi ini dilandaskan pada pikiran seseorang
2. Partisipasi tenaga, bentuk Partisipasi ini berada pada level kedua dengan memanfaatkan tenaga seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
3. Partisipasi pikiran dan tenaga, bentuk Partisipasi ini dilakukan secara kolektif pada suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Partisipasi ini biasanya ada pada suatu Lembaga atau partai.
4. Partisipasi keahlian, bentuk partisipasi ini berada pada level empat dimana berfokus pada penggunaan keahlian untuk menentukan kebutuhan
5. Partisipasi barang, pada level kelima untuk mencapai yang diinginkan menggunakan sebuah barang untuk memperlancar tujuan
6. Partisipasi uang, pada level yang terakhir menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai yang diinginkan. Pada level ini biasanya dilakukan pada Partisipasi oleh orang-orang kalangan atas.

## **2. Pengembangan Desa Wisata**

Menurut Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, sarana prasarana atau akomodasi dan fasilitas pendukung wisata yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat pedesaan yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Antara & Arida, 2015). Menurut Putra (2006), Desa Wisata adalah pengembangan desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, sehingga menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu. Dengan demikian, Desa Wisata merupakan suatu bentuk pengembangan pariwisata yang menitik

beratkan pada kontribusi dan partisipasi masyarakat suatu desa, dan pelestarian lingkungan area pedesaan.

Pengembangan Desa Wisata merupakan suatu proses yang mengacu pada cara untuk memajukan desa wisata. Pengembangan desa secara detail diartikan sebagai usaha dalam melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan (Geogra & Gadjah, 2013).

Menurut Soemarno (dalam Hidayah, 2017), pengembangan Desa Wisata dilakukan melalui upaya-upaya seperti berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan seminar, diskusi, Pendidikan, dan cara lain yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan.
2. Kerja sama yang dapat menguntungkan antara pihak pengelola desa dengan pembina desa wisata atau pihak dinas pariwisata daerah. Kerja sama dalam bidang usaha seperti perjalanan, promosi, pelatihan, akomodasi, dan lain-lain.
3. Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan di desa wisata, seperti rapat-rapat dinas, upacara hari-hari besar, dan pemeran pembangunan.
4. Melakukan promosi desa wisata dengan menggunakan berbagai media.
5. Penyelenggaraan festival atau pertandingan yang dapat menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk berkunjung ke desa tersebut.
6. Membina organisasi masyarakat.
7. Kerja sama dengan perguruan tinggi dengan tujuan pengembangan dan pengabdian dilakukan di desa wisata.

Richard Butler mengemukakan suatu konsep pengembangan di suatu daerah wisata. Konsep ini disebut *Tourism Area Life Cycle* (TALC) yang berarti siklus hidup pariwisata di daerah atau wilayah tertentu. Terdapat tujuh tahap *tourism area life cycle* yaitu:

1. Explorasi/penemuan (*Exploration*): tahap ini merupakan tahap awal suatu daerah mulai berkembang menjadi daerah destinasi wisata. Jumlah

wisatawan cenderung masih sedikit. Jenis atraksi biasanya masih cenderung alam dan budaya yang masih berusaha dikembangkan lagi. Dalam tahap ini, pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengembangkan potensi yang dimiliki di daerah tersebut. Dampak dari pengembangan pariwisata masih belum tampak dan berskala kecil.

2. *Pelibatan (Involvement)*: dalam tahap ini pengembangan wisata semakin meningkat, dan jumlah wisatawan semakin bertambah. Pembangunan sarana dan fasilitas seperti *homestay*, layanan makanan dan minuman, pelayanan jasa, dan lain-lain. Para investor mulai tertarik untuk berbisnis, sehingga pemerintah dituntut untuk mengembangkan infrastruktur untuk mempermudah kunjungan wisatawan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah mulai melakukan sosialisasi atau periklanan dengan skala terbatas.
3. *Pengembangan (Development)*: tahap ini jumlah wisatawan sudah berskala besar dan investor nasional maupun internasional mulai menanamkan modal. Perusahaan asing mulai beroperasi dan cenderung menggantikan usaha lokal yang dikelola oleh masyarakat lokal. Mulai dibentuk organisasi pariwisata yang bertujuan untuk promosi bersama pemerintah, hal ini digunakan untuk menarik para investor asing agar berinvestasi.
4. *Konsolidasi (Consolidation)*: tahapan ini kecenderungan didominasi oleh jaringan internasional yang memegang peranan destinasi wisata. Sehingga adanya persaingan harga diantara perusahaan yang sejenis dalam bidang pariwisata. Peranan pemerintah mulai semakin berkurang, sehingga diperlukan konsolidasi untuk reorganisasional dan menyeimbangkan peran antara sektor pemerintah dan swasta.
5. *Stagnan (Stagnation)*: dalam tahapan ini mulai muncul kondisi yang stagnan dan berapa pada titik jenuh. Pada tahap ini muncul persaingan dalam industri pariwisata, sehingga fasilitas pariwisata mulai dijual dengan harga yang rendah untuk tetap mempertahankan kunjungan wisatawan. Selain itu, muncul masalah-masalah sosial dan lingkungan karena masyarakat berebut sumber daya dengan penduduk pendatang.

6. Penurunan (*Decline*): setelah sampai pada titik jenuh, terdapat beberapa ancaman kelangsungan destinasi pariwisata. Jika tidak segera menemukan solusi yang tepat dari tahap stagnasi, kemungkinan besar destinasi akan ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka memilih wisata yang lebih menarik. Terjadi penurunan kualitas yang menyebabkan berkurangnya permintaan dan keuntungan menurun.
7. Peremajaan (*Rejuvenation*): setelah mengalami penurunan, perlu adanya pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencari pasar baru, dan penataan Kembali atraksi ke dalam bentuk yang lebih menarik. Masyarakat memiliki otoritas penuh dalam melakukan inovasi dalam menciptakan tatanan baru.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa tahapan pengembangan Desa Wisata yaitu seperti berikut:

1. Perencanaan: dalam tahap ini meliputi identifikasi potensi dan daya Tarik wisata, melakukan penyusunan rancangan kerja dan anggaran, melakukan peningkatan kesadaran warga sekitar akan potensi wisata yang ada, melakukan pemilihan untuk kepengurusan pengelolaan desa wisata, menyusun SOP dan peraturan desa.
2. Pelaksanaan: untuk tahap pelaksanaan berupa persiapan sumber daya manusia, mensosialisasikan rencana aksi yang sudah dirancang sebelumnya kepada masyarakat, melakukan promosi dan pemasaran wisata, mulai meningkatkan tata ruang, infrastruktur, kualitas produk dan layanan pariwisata. Melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
3. Pemantauan dan evaluasi: pada tahap ini dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Lembaga meliputi pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit dari pembiayaan. Selain itu akan ada pengumpulan data yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan dilakukan pelaporan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di setiap tahap pengembangan yang dijabarkan oleh PPN/Bappenas. Peneliti menggunakan konsep partisipasi melalui konsep Keith Davis untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi yang ada dalam pengembangan Desa

Wisata Tingkir Lor Salatiga. Sedangkan untuk pengembangan desa wisata, peneliti menggunakan konsep dari PPN/Bappenas.

### **3. Desa Wisata**

Desa wisata merupakan desa yang di dalamnya terjadi kegiatan pariwisata, hal ini dikarenakan adanya daya tarik kehidupan desa yang memiliki karakteristik termasuk dalam masyarakat yang ada di desa tersebut (Purwanggono, dalam Jannah & Suryasih, 2019).

Menurut Hardiwijoyo (dalam Sudibya, 2018), desa wisata memiliki beberapa kriteria seperti berikut:

1. Memiliki aksesibilitas yang baik, mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis transportasi.
2. Memiliki objek menarik seperti alam, legenda, makanan lokal, seni budaya, dan lain-lain yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata.
3. Masyarakat dan petugas desa menerima dan mendukung adanya desa wisata, serta wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut.
4. Keamanan desa terjamin.
5. Adanya akomodasi, telekomunikasi dan sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang memadai.
6. Memiliki iklim yang sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan objek wisata lain yang dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam (Wirdayanti et al., 2021) dijelaskan terdapat empat jenis desa wisata yaitu:

#### **1. Rintisan**

Dalam klasifikasi desa wisata rintisan masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk destinasi wisata. Sarana dan prasarana wisata masih terbilang terbatas. Kesadaran masyarakat terdapat potensi wisata masih belum tumbuh, sehingga pengelolaannya pun masih bersifat lokal desa. Wisatawan yang berkunjung masih sedikit dan pengembangan desa masih memanfaatkan dana desa. Oleh karena itu, masih perlu pendampingan dari pihak seperti pemerintah dan swasta.

#### **2. Berkembang**

Desa wisata bisa dikatakan berkembang jika sudah mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah. Kemudian pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah mulai berkembang. Lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi sudah mulai tercipta bagi masyarakat

### 3. Maju

Desa wisata yang tergolong maju sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Kesadaran masyarakatnya sudah sepenuhnya tumbuh, sehingga sistem pengelolaan sudah memiliki dampak pada peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan dana untuk pengembangan desa wisata.

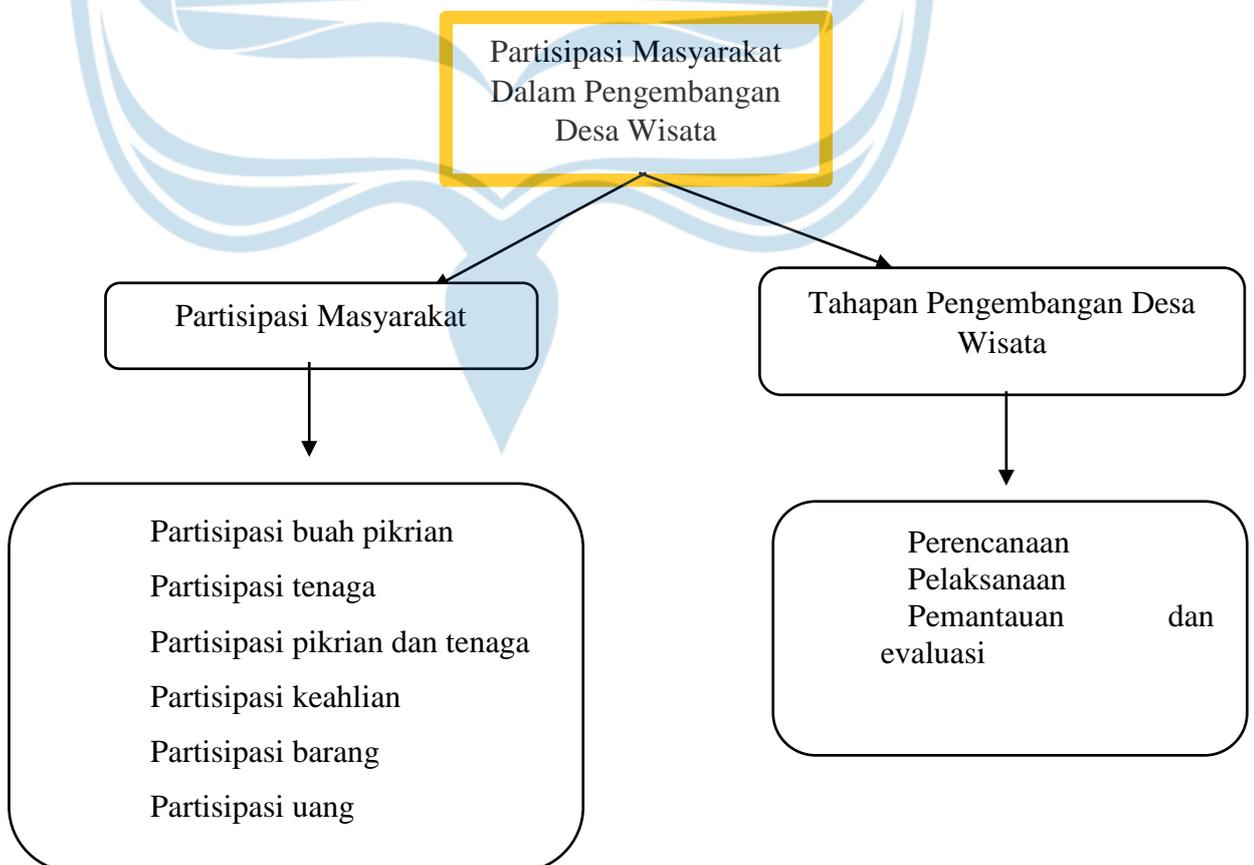
### 4. Mandiri

Dalam tahap yang terakhir, desa wisata sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah memiliki konsep keberlanjutan. Masyarakat dapat memberikan inovasi dalam pengembangan potensi desa wisata. Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif antar sektor. Desa wisata telah memanfaatkan digitalisasi sebagai promosi mandiri. Kemudian untuk sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional seperti ASEAN

## F. Kerangka Berpikir

Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kemasyarakatan. Pada dasarnya pengembangan desa wisata memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi merupakan suatu hal yang penting dan mengandung potensi besar dalam membina kerja sama tim. Akan tetapi dalam pengembangan desa wisata masih terdapat permasalahan yang menghambat proses pengembangan. Kurangnya sumber daya manusia memiliki potensi dalam bidang pariwisata, kemudian keterbatasan tentang pengetahuan pariwisata dapat berdampak pada rendahnya partisipasi Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga. Konsep yang akan dipakai adalah bentuk partisipasi dari Keith Davis yang dibagi menjadi enam yaitu: partisipasi buah pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang.



## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini, agar pembahasan berfokus pada pokok permasalahan yang utama. Peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir

### **BAB 2 METODOLOGI DAN DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai jenis penelitian & metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi objek penelitian.

### **BAB 3 TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai hasil temuan dan pembahasan

### **BAB 4 KESIMPULAN**

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan dari temuan penelitian.